PARIWISATA ALTERNATIF Mendukung PROGRAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN EKONOMI KERAKYATAN

Made Ruki

Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali,
Jln. Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali. Tlp. 0361 7101981 ext 196
E-mail: rukimade06@yahoo.com. Hp: 081237608825

ABSTRACT. *This paper analyzes the role of tourism in supporting sustainable development, and economic empowerment. So far tourism has greatly contributed to the economic growth and employment, but it also worries because the negative impact caused is very complex, both in terms of social, cultural, economic, and natural resources and the environment. It is a paradox in the lives of mankind today especially associated with the current development paradigm, namely sustainable development that was declared by the United Nations through the Rio Summit, 1992, which aimed to conserve natural resources and the environment. To answer that, then it is pushed to streamline the model of tourism known as alternative tourism. How can the alternative tourism support sustainable development programs? That is what will be further discussed through this paper, and how it can empower a community economic development. This post data is collected from various sources of literature and other reliable sources on the internet, then analyzed and compiled into a complete text.*

KEYWORDS: *alternative tourism, sustainable development, community economic.*

PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi kekuatan ekonomi utama banyak negara di dunia dan mampu mengubah standard hidup serta distribusi pendapatan. Namun perluasan kegiatan wisata telah pula membawa berbagai dampak negatif, misalnya menimbulkan perubahan dan ketegangan budaya, politik, serta lingkungan hidup secara signifikan.

Dampak pengembangan pariwisata sangat mencolok, baik di kota-kota dan negara-negara dari mana sejumlah besar wisatawan berasal, di mana tour operator, pemerintah, dan kepentingan ekonomi lainnya bersaing melalui iklan dan penciptaan image untuk menarik pelanggan pariwisata, mau pun di tempat tujuan wisata, di mana mereka membangun berbagai macam fasilitas untuk layanan pariwisata, hingga menimbulkan efek negatif yang nyata (Smith & Eadington, 1992).

Model pariwisata modern yang dikenal dewasa ini, sering disebut pariwisata massal (*mass tourism*), bermula dari suatu kegiatan wisata yang dipelopori oleh Thomas Cook. Ia menyelenggarakan suatu *inclusive tour* dari Leicester ke Loughborough, pada tanggal 5 juli 1842 dengan biaya satu *shilling* per orang. Paket wisata atau *inclusive tour* itu diikuti oleh 570 orang berkat upaya promosi yang dilakukan melalui iklan. Keberhasilan Thomas Cook itu kemudian ditiru oleh orang lain dengan mendirikan perusahaan-perusahaan perjalanan (*tour operators*) yang menyelenggarakan berbagai paket wisata.

Dewasa ini industri pariwisata dipandang sebagai semacam paradoks di tengah kehidupan umat manusia, sebab di satu sisi ia merupakan kegiatan untuk pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan namun di sisi lain ia merupakan ancaman bagi kelestarian sumber daya alam, lingkungan, maupun sosial-budaya. Apalagi dikaitkan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang dideklarasikan PBB pada KTT Rio tahun 1992 yang sangat memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan, maupun sosial-budaya agar tetap bisa dinikmati generasi mendatang. Menyadari kenyataan itu, UNWTO pun sempat skeptis dengan masa depan pariwisata (Kodhyat, 1995), sehingga perlu dicarikan jalan keluar yang mendasar untuk menyelamatkan kegiatan pariwisata di satu sisi dan kehidupan masa depan umat manusia di sisi lain.

Berkaitan dengan keadaan itu maka kemudian dicarikan solusi dengan mengembangkan model pariwisata baru, yang kemudian dikenal dengan istilah pariwisata alternatif atau pariwisata berkelanjutan. Dengan munculnya istilah pariwisata alternatif ini maka pariwisata modern atau pariwisata masal yang dikenal sebelumnya lalu dianggap sebagai pariwisata konvensional. Diharapkan pariwisata alternatif ini dapat mengatasi berbagai masalah atau dampak negatif yang diakibatkan oleh pariwisata konvensional tersebut, selain untuk lebih memberdayakan masyarakat lokal, baik secara ekonomi maupun budaya, serta menjadi bagian dari program besar pembangunan berkelanjutan untuk mengantisipasi ancaman serius terhadap kualitas lingkungan hidup global akibat pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang kurang terencana.

Tulisan ini memaparkan posisi dan peran pariwisata alternatif dalam paradigma pembangunan berkelanjutan serta bagaimana ia mampu memberdayakan atau membangun ekonomi kerakyatan, sehingga pariwisata bukan lagi sesuatu yang mencemaskan, merusak nilai-nilai sosial dan lingkungan, tetapi justru menjadi solusi yang menguntungkan secara ekonomi dan berperan melestarikan beragam sumber daya sosial, sumber daya alam serta lingkungan.

PEMBAHASAN

Pertumbuhan Pariwisata

Pada situs World Travel & Tourism Council (WTTC) (<http://.wttc.org/news-media/news-archive/2013/travel-and-tourism-demand-21st-century>) yang diakses 1 September 2013, dinyatakan pariwisata merupakan salah satu penggerak utama perekonomian dunia abad 21. Dijelaskan pula bahwa saat ini industri pariwisata adalah salah satu pencipta pekerjaan utama di dunia. Tahun 2012 pariwisata dunia mampu mempekerjakan lebih dari seratus juta orang secara langsung. Bahkan disebutkan pangsa dunia kerja pariwisata lebih

besar dari manufaktur mobil dan manufaktur bahan kimia industri gabungan di setiap wilayah di dunia. Selain itu, prospek industri pariwisata relatif positif. Pertumbuhan pekerjaan dalam bisnis ini diperkirakan rata-rata 1,9 persen per tahun selama sepuluh tahun ke depan. Lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan pertumbuhan 1,2 persen per tahun untuk jumlah pekerjaan lain dalam ekonomi global.

Tahun lalu jumlah wisatawan di seluruh dunia telah mencapai lebih satu miliar orang untuk pertama kalinya. Statistik yang diterbitkan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) menunjukkan bahwa ada 1,035 miliar wisatawan pada tahun 2012. Angka ini naik empat persen dari jumlah wisatawan tahun 2011, yakni 996.000.000 wisatawan.

Pada tahun 2013, pertumbuhan wisatawan diperkirakan naik sekitar 5% dibandingkan dengan tahun 2012. Menurut data yang dirilis UNWTO, proyeksi yang dibuat pada awal tahun ini melebihi tren pariwisata jangka panjang UNWTO Menuju 2030 yakni 3,8% per tahun.

Pariwisata merupakan salah satu sektor bisnis yang paling dinamis dan cepat berkembang. Ia berkontribusi 9 persen pada GDP global (UNWTO, 2011, WTTC 2012). Pada tahun 2011, pariwisata bertanggung jawab untuk 4,6 persen dari total investasi modal global. Sektor ini menciptakan lebih banyak pekerjaan dari jasa keuangan, komunikasi dan industri pertambangan.

Sedangkan kontribusi pariwisata terhadap PDB langsung pada 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 3,1% dan akan melampaui pertumbuhan total ekonomi global (2,4%) pada tahun 2013. Prospek jangka panjangnya bahkan lebih positif dengan pertumbuhan tahunan diperkirakan menjadi 4,4% per tahun selama sepuluh tahun, hingga 2022 (WTTC, 2012).

Namun selain membawa dampak positif, khususnya di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, pariwisata juga membawa dampak negatif.

Dampak Negatif Pariwisata

Banyak dampak negatif dari pariwisata terjadi ketika jumlah pengunjung lebih besar dari kemampuan lingkungan untuk mengatasi volume pengunjung. Beberapa konsekuensi melebihi kapasitas lingkungan termasuk terjadinya ketegangan pada sumber daya yang sudah langka seperti air, energi, pangan, dan kawasan habitat alami. Selain itu, pengembangan pariwisata dapat menyebabkan erosi tanah, peningkatan polusi dan limbah, meningkatkan tekanan pada spesies langka hewan dan tumbuhan, dan kerentanan yang meningkat terhadap kerusakan lingkungan hijau (hutan) serta hilangnya keanekaragaman hayati (UNEP, 2012).

Pariwisata dapat mengganggu kelestarian dan keaslian sosial budaya masyarakat setempat. Pariwisata juga dapat mengikis nilai-nilai tradisional dengan memperkenalkan unsur-unsur asing yang bertentangan dengan warisan budaya, sejarah, dan agama masyarakat. Pariwisata juga dapat menyebabkan perubahan atau hilangnya identitas dan nilai-nilai lokal, antara lain:

a. Komodifikasi

Pariwisata dapat mengubah budaya lokal menjadi komoditas ketika ritual keagamaan, upacara tradisional etnis dan festival, dimodifikasi agar sesuai dengan selera wisatawan, sehingga kemudian timbul apa yang disebut "etnis direkonstruksi". Setelah dijual sebagai produk pariwisata, untuk *souvenir*, seni hiburan dan komoditas lain maka dikhawatirkan perubahan mendasar dalam nilai-nilai ritual dan kemanusiaan tersebut akan semakin kuat. Situs suci dan objek lainnya mungkin tidak lagi dihormati atau kurang dihargai karena dianggap sebagai barang dagangan.

b. Bentrokan dan kerusakan budaya

Karena pariwisata melibatkan pergerakan orang dan membentuk hubungan sosial antara banyak orang maka bentrokan budaya dapat terjadi sebagai akibat dari perbedaan budaya, kelompok etnis dan agama, nilai-nilai dan gaya hidup, serta bahasa. Hal ini bisa menimbulkan eksploitasi berlebihan dari daya dukung sosial dan budaya masyarakat khususnya di daerah-daerah tujuan wisata.

Para wisatawan seringkali gagal menghargai adat istiadat dan nilai-nilai moral setempat. Misalnya, di banyak negara Muslim, yang memiliki standar ketat, dapat terlihat dari penampilan dan perilaku perempuan Muslim yang harus hati-hati menutupi diri mereka di depan umum, namun wisatawan sering mengabaikan atau tidak menyadari standar-standar ini. Mereka mengabaikan *dress code* umum, dan muncul di tengah-tengah masyarakat dengan pakaian minim atau bikini, berjemur topless di pantai, atau mengonsumsi alkohol dalam jumlah besar secara terbuka. Perilaku semacam ini dapat memengaruhi penduduk setempat untuk tidak menghormati tradisi dan agama mereka lagi, dan bahkan menyebabkan ketegangan di masyarakat setempat. UNEP (2012) mencontohkan bentrokan budaya semacam itu dapat terjadi dalam komunitas Kristen konservatif di Polynesia, Karibia dan Mediterania.

Kerusakan sumber daya budaya mungkin timbul dari vandalisme, pencurian dan penghapusan ilegal barang warisan budaya. Masalah yang umum di situs arkeologi di negara-negara seperti Mesir, Kolombia, Meksiko dan Peru, sebagaimana hasil penelitian UNEP (2012), adalah bahwa para pekerja atau penjaga kurang dibayar sehingga mereka mencari

tambahan penghasilan dengan menjual artefak kepada wisatawan. Kebiasaan ini lambat laun akan menghancurkan sumber daya budaya tersebut. Selanjutnya, degradasi situs budaya dapat terjadi ketika situs bersejarah dan lingkungan yang dibangun secara tradisional diganti dengan bangunan baru atau hilang karena kurang dirawat.

Konflik juga dapat terjadi dengan masyarakat tradisional dalam hal penggunaan lahan, terutama di daerah yang sangat dieksploitasi pariwisata, seperti daerah pesisir dan pulau-pulau. Konflik muncul ketika pilihan harus dibuat antara mengembangkan lahan untuk fasilitas wisata atau dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat lokal. Untuk alasan investasi dan kepentingan pariwisata maka penduduk lokal sering kali dijadikan pecundang dan mereka kehilangan otoritas terhadap sumber daya lingkungan tradisional mereka sendiri. Dampak lanjutannya akan dapat berakibat lebih buruk, yakni masyarakat lokal akan kehilangan mata pencaharian atau sumber kehidupan serta termarginalkan dari akar budayanya.

c. Kesenjangan ekonomi

Banyak wisatawan datang dari masyarakat dengan pola konsumsi dan gaya hidup yang berbeda dari apa yang berlaku di tempat tujuan wisata. Mereka mencari kesenangan, menghabiskan uang dalam jumlah besar dan kadang-kadang berperilaku dengan cara yang bahkan mereka sendiri tidak akan menerima di tempat asalnya. Salah satu efeknya adalah bahwa orang-orang lokal yang melakukan kontak dengan wisatawan ini dapat mengembangkan semacam perilaku “menyimpang”, karena mereka ingin hidup dan berperilaku dengan cara yang sama dengan wisatawan. Di negara-negara berkembang, besar kemungkinan tumbuhnya perbedaan antara 'si kaya' dan 'si miskin', yang dapat meningkatkan ketegangan sosial dan etnis. Di resort di negara tujuan wisata seperti Jamaika, Indonesia atau Brazil, pekerja pariwisata dengan gaji tahunan rata-rata US \$ 1.200 menghabiskan jam kerja mereka dengan wisatawan yang pendapatannya lebih dari US \$ 80.000.

Di negara-negara berkembang khususnya, pekerjaan yang diduduki oleh orang-orang lokal dalam industri pariwisata lebih banyak pada level yang lebih rendah, seperti pembantu rumah tangga, pelayan, tukang kebun dan kerja praktis lainnya, sementara pekerjaan manajerial dengan gaji tinggi dan lebih bergengsi dipegang orang asing. Karena kurangnya pelatihan profesional, serta pengaruh hotel atau rantai restoran di tempat tujuan, orang-orang dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tingkat yang lebih tinggi sering harus didatangkan dari negara lain. Hal ini dapat meningkatkan kesenjangan ekonomi, bahkan menimbulkan gesekan sosial.

d. Dampak Lingkungan

Hubungan pariwisata dengan lingkungan memang kompleks karena pariwisata melibatkan banyak kegiatan yang dapat berdampak pada lingkungan. Banyak dari dampak ini terkait dengan pembangunan infrastruktur umum seperti jalan dan bandara, dan fasilitas pariwisata, termasuk resor, hotel, restoran, toko, lapangan golf dan marina. Dampak negatif dari pembangunan pariwisata secara bertahap dapat menghancurkan sumber daya lingkungan.

e. Dampak negatif lainnya

Pengelola pariwisata dapat menekan pemerintah agar meningkatkan fasilitas bandara, jalan dan infrastruktur lainnya, untuk kepentingan pariwisata, dan bahkan mereka meminta keringanan pajak serta subsidi keuangan lainnya. Ini merupakan kegiatan yang memakan biaya pemerintah. Sumber daya publik dibelanjakan untuk infrastruktur bersubsidi atau keringanan pajak yang artinya dapat mengurangi investasi pemerintah untuk soal-soal penting lainnya yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, pengembangan pariwisata dan kenaikan permintaan real estate dapat secara dramatis meningkatkan biaya bangunan dan nilai tanah. Hal ini tidak hanya membuat sulit masyarakat lokal, terutama di negara berkembang, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari, juga dapat mengakibatkan dominasi oleh orang luar di pasar tanah dan properti yang mengikis kesempatan ekonomi penduduk. Di Kosta Rika, lebih dari 65 % hotel adalah milik asing (UNEP, 2013). Turis jangka panjang tinggal di rumah kedua, misalnya dengan mengontrak apartemen, dan kecenderungan ini menyebabkan harga properti naik secara signifikan, yang berarti semakin menyulitkan warga lokal untuk memiliki properti. Hal ini berpotensi menimbulkan kerawanan sosial.

Pariwisata Alternatif

Pariwisata alternatif merupakan suatu bentuk kegiatan kepariwisataan yang tidak merusak lingkungan, berpihak pada ekologi dan menghindari dampak negatif dari pembangunan pariwisata berskala besar yang dijalankan pada suatu area yang tidak terlalu cepat pembangunannya (Koslowski: 1985).

Pariwisata alternatif dimaksudkan untuk meminimalisir dampak negatif dari perkembangan pariwisata konvensional yang terjadi hingga saat ini, dan merupakan kegiatan atau suatu pembangunan kepariwisataan yang berskala kecil, serta segala aktivitasnya turut melibatkan masyarakat. Selain itu, pariwisata alternatif berusaha untuk mencapai saling

pengertian, solidaritas dan kesetaraan di antara wisatawan dengan penduduk lokal (Holden, 1984)

Perlu disampaikan bahwa kini daerah-daerah tujuan wisata, khususnya di kawasan Asia, didorong untuk terus mengembangkan bentuk pariwisata alternatif. Hal ini dimulai sejak diselenggarakan lokakarya pariwisata pada 9-15 Juni 1975 di Penang, Malaysia. Lokakarya itu membahas pariwisata dari dimensi yang berbeda, yakni dari sisi kemanusiaan. Sebelumnya, pariwisata lebih banyak dipandang dari sudut ekonomi saja (Kodhyat, 1995). Pada lokakarya Penang itu dibicarakan sisi negatif pariwisata, antara lain terjadinya degradasi nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai moral, komersialisme, penggusuran penduduk, kesenjangan ekonomi, dan meningkatnya praktik pelacuran. Mereka menganggap pembangunan pariwisata di negara-negara berkembang, sebagai suatu pilihan sulit antara mengejar keuntungan ekonomi dengan dampak negatif yang ditimbulkannya.

Di Manila, *World Tourism Organization* (WTO), sekarang *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO), juga menyelenggarakan kongres untuk mencari bentuk-bentuk pariwisata alternatif, yakni suatu model pariwisata yang lebih adil terhadap penduduk atau masyarakat. Pada lokakarya WTO ketiga di Chiang Mai, Thailand, 26 April – 8 Mei 1984, dirumuskan satu bentuk pariwisata alternatif, yang definisinya sebagai berikut: “*Alternative tourism is a process which promotes a just form of travel between members of different community. It seeks to achieve mutual understanding, solidarity and equality among participant*” (Pariwisata alternatif adalah suatu proses yang mengembangkan bentuk kegiatan pariwisata yang adil antara beberapa komunitas yang berbeda, yang tujuannya untuk menjalin saling pengertian, solidaritas, dan kesetaraan antara pihak-pihak bersangkutan).

Dalam perkembangannya diketahui bahwa yang dimaksud dengan pariwisata alternatif adalah kegiatan kepariwisataan atau pembangunan pariwisata yang berskala kecil, suatu kegiatan kepariwisataan yang disuguhkan kepada wisatawan di mana segala aktivitasnya melibatkan masyarakat lokal, menjaga keaslian budaya, lingkungan, dan sumber daya setempat lainnya, (Gonsalves: 1984). Ia merupakan obat untuk mengatasi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh pariwisata masal. Dalam perkembangannya konsep pariwisata alternatif ini juga dikenal dengan istilah pariwisata berkelanjutan.

Pada tahun 1992, dalam *United Nation Conference on Environment and Development -the Earth Summit-* di Rio de Janeiro, dirumuskan program menyeluruh hingga abad ke-21 yang disebut Agenda 21, yang kemudian diadopsi 182 negara peserta konferensi. Agenda 21 merupakan *blueprint* untuk menjamin masa depan yang berkelanjutan dari planet bumi dan merupakan dokumen yang mendapatkan kesepakatan internasional yang sangat luas dan komitmen politik tingkat tinggi.

Dalam hal kepariwisataan, pertemuan Rio tersebut ditindaklanjuti dengan Konferensi Dunia tentang Pariwisata pada tahun 1995 yang merekomendasikan pemerintah negara dan daerah untuk menyusun rencana tindak pembangunan pariwisata dengan pendekatan baru atau pariwisata alternatif yang kemudian dideklarasikan lewat Piagam Pariwisata Berkelanjutan.

Agenda 21 untuk dokumen industri pariwisata berisi prioritas tindakan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan langkah-langkah yang disarankan untuk diambil untuk mencapainya. Dokumen ini menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah, industri dan organisasi non-pemerintah, analisis kepentingan strategis dan ekonomi dan menunjukkan manfaat besar dalam membuat industri pariwisata berkelanjutan.

Dalam laporan UNWTO (2013) disampaikan kerangka kerja untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan harus didasarkan pada Deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan pariwisata, dengan sejumlah prinsip:

1. Pariwisata harus membantu orang-orang dalam kehidupan yang sehat, produktif, harmonis dengan alam.
2. Pariwisata harus berkontribusi untuk konservasi, perlindungan dan pemulihan ekosistem bumi
3. Pariwisata harus didasarkan pada pola berkelanjutan produksi dan konsumsi.
4. Pariwisata harus selalu mengacu pada perdamaian, pembangunan dan perlindungan lingkungan yang independen.
5. Proteksionisme dalam perdagangan jasa Travel & Tourism harus dihentikan atau dibatalkan.
6. Perlindungan lingkungan harus merupakan bagian integral dari proses pengembangan pariwisata.
7. Masalah pembangunan pariwisata harus ditangani dengan partisipasi warga negara yang bersangkutan, dengan keputusan perencanaan yang diadopsi di tingkat lokal.
8. Pembangunan pariwisata harus menggunakan kapasitasnya untuk menciptakan lapangan kerja sepenuhnya bagi perempuan dan masyarakat adat.
9. Pengembangan pariwisata harus mengakui dan mendukung identitas, kebudayaan dan kepentingan masyarakat adat.
10. Hukum internasional melindungi lingkungan dan harus dihormati oleh industri pariwisata

Berikut beberapa contoh pariwisata alternatif yaitu :

a. Ekowisata

Ekowisata merupakan bentuk wisata yang menaruh perhatian besar terhadap kelestarian sumberdaya lingkungan, bertanggung jawab dengan cara mengonservasi

lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Ekowisata merupakan kegiatan wisata yang bersifat *sustainable* atau berkelanjutan yang dapat membawa keuntungan pada semua aspek baik lingkungan, sosial budaya maupaun ekonomi masyarakat lokal (Budiarta, 2012)

Menurut Damanik, Janianton & Weber, Helmut F. (2006: 37) ekowisata memiliki tujuh prinsip, yakni:

- 1) Mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal
- 2) Membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya di destinasi wisata, baik pada wisatawan, masyarakat lokal maupun pelaku wisata lainnya.
- 3) Menawarkan pengalaman-pengalaman positif bagi wisatawan maupun masyarakat lokal melalui kontak budaya yang lebih intensif dan kerjasama dalam pemeliharaan atau konservasi DTW.
- 4) Memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan.
- 5) Memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal dengan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai lokal.
- 6) Meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan dan politik di DTW.
- 7) Menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja, dalam arti memberikan kebebasan bagi wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati atraksi wisata sebagai wujud hak asasi, serta tunduk pada aturan main yang adil dan disepakati bersama dalam pelaksanaan transaksi-transaksi wisata.

b. Pariwisata Agro

Pariwisata agro suatu kegiatan wisata yang menaruh perhatian besar terhadap sektor pertanian dan perkebunan seperti: berwisata ke kebun strawberry, apel, jeruk, kopi, anggur, dan sebagainya. Dalam kegiatan pariwisata agro menekankan pada pengalaman dan belajar tentang tanaman dan dikelola secara baik sehingga dapat membawa dampak positif bagi masyarakat lokal.

c. Pariwisata Pedesaan

Pariwisata Pedesaan merupakan kegiatan wisata yang ditujukan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pedesaan sebagai tempat untuk istirahat, belajar budaya suatu daerah dan mendapatkan pengalaman hidup yang berbeda dari daerah asalnya. Menurut Picard, 1992 (dalam Budiarta, 2012) keunikan dan keanekaragaman budaya, kesenian, dan nilai-nilai kehidupan yang tersebar di desa-desa merupakan daya tarik wisata yang asli, tidak dibuat-buat, sehingga wisatawan bisa menikmati dan mengapresiasinya dengan baik.

Pariwisata pedesaan dikelola dalam skala kecil dan melibatkan seluruh anggota masyarakat desa yang bersangkutan. Misalnya masyarakat desa membuat *homestay* dengan mempekerjakan masyarakat setempat. Juga memanfaatkan kelompok-kelompok kesenian lokal sebagai *entertainer* bagi wisatawan. Untuk kebutuhan makanan dan minuman wisatawan sedapat mungkin dibeli dari para pedagang dan petani setempat sehingga petani dan pedagang pun ikut mendapatkan rejeki dari pariwisata.

Pembangunan Berkelanjutan.

Lewat Agenda 21, hasil konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development, UNCED*), di Rio de Janeiro, Brasil, tanggal 3 sampai 14 Juni 1992, yang populer dengan istilah KTT Rio (Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio), mulai diperkenalkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *World Commission on Environment and Development*, yang lebih dikenal dengan nama Komisi Brundtland mendefinisikan pembangunan berkelanjutan tersebut sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri" (UNECE, 2013). Konsep ini mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang kuat. Pada saat yang sama ia menggarisbawahi pentingnya melindungi sumber daya alam dan lingkungan, ekonomi dan sosial. Ia juga sangat memperhatikan solidaritas antargenerasi, dan oleh karena itu paradigma pembangunan berkelanjutan ini sangat memperhitungkan dampak pembangunan terhadap peluang bagi generasi mendatang.

Konsep pembangunan berkelanjutan kini menjadi pegangan semua negara dan masyarakat dunia, diakomodasi dalam perjanjian-perjanjian internasional, dalam implementasi nasional atau peraturan perundang-undangan. Pembangunan berkelanjutan merupakan cara untuk meningkatkan mutu hidup generasi kini dengan tanpa menghancurkan modal dan sumber alam bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan empat hal:

- a. Pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbarui;
- b. Melestarikan dan menggantikan sumber alam yang bersifat jenuh (*exhaustible resources*);
- c. Pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis;
- d. Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.

Dengan demikian pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai pembangunan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan

kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.

Ekonomi Kerakyatan

Yang dimaksud ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang digerakkan berdasarkan prinsip optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya teknologi, sumber daya permodalan, sumber daya manusia (pelaksana dan pakar) yang ada untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak. Ia merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada potensi ekonomi yang ada pada masyarakat dan dimanfaatkan atau dinikmati oleh masyarakat (Mubyarto, 2003)

Berbeda dengan ekonomi liberal atau dikenal dengan ekonomi pasar bebas yang sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar, pasar dikuasai oleh para pemilik modal besar, serta kurang berpihak kepada rakyat banyak (Ishaq, 2013), sistem ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan, secara swadaya masyarakat mengelola segala sumber daya yang ada untuk dapat dimanfaatkan dan dikuasainya menjadi suatu materi yang berharga. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan kesungguhan membela ekonomi rakyat (Baswir, 2000).

Kekuatan sistem ekonomi kerakyatan adalah: (1) terlindunginya rakyat banyak dari persaingan yang tidak seimbang dengan para pemilik modal besar, (2) lebih mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak, (3) memperkecil kesenjangan antara si kaya dengan si miskin, dan (4) menciptakan hubungan sinergis antara pemilik modal besar dengan masyarakat banyak sebagai mitra kerjanya (Ishaq, 2013).

SIMPULAN DAN SARAN

Pariwisata konvensional selain memberi manfaat penting bagi perekonomian dan penciptaan lapangan kerja juga sangat mengkhawatirkan karena mengakibatkan dampak negatif yang besar dan kompleks, baik dalam hal sumber daya sosial, ekonomi, maupun lingkungan, yang mengancam kehidupan generasi berikutnya. Untuk mengatasi hal tersebut maka kemudian dicarikan solusi dengan konsep yang dikenal dengan istilah pariwisata alternatif. Pariwisata alternatif sangat mengutamakan nilai-nilai alam, sosial, dan masyarakat, serta memungkinkan masyarakat lokal dan wisatawan menikmati interaksi positif dan bermanfaat serta menikmati pengalaman secara bersama-sama. Kegiatan-kegiatan pariwisata alternatif menyatu dan berinteraksi di tengah-tengah kehidupan masyarakat setempat. Wisatawan bisa menikmati kegiatan bersama masyarakat, misalnya mempelajari sosial

budaya orang lokal seperti belajar menari, bahasa, memasak makanan lokal, jalan-jalan menikmati keindahan suasana kehidupan alam pedesaan, dan kegiatan-kegiatan lain yang jauh dari suasana bising dan polusi. Karena sifat pariwisata alternatif sangat akrab dan menghormati sumber daya sosial, sistem nilai dan budaya, sumber daya alam mau pun lingkungan, maka dengan sendirinya ia tidak bertentangan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang sekarang dianut oleh hampir seluruh negara di dunia. Pariwisata alternatif yang diselenggarakan oleh masyarakat tersebut akan membuat partisipasi dan tanggung jawab warga maksimal dalam melakukan kontrol terhadap pengembangan dan pemanfaatan sumber daya di daerahnya. Sebab ini menyangkut kelangsungan kehidupan komunitas dan anak-cucu mereka di masa depan, serta hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan (pariwisata) berkelanjutan seperti ditetapkan PBB, bahwa: pembangunan pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal, dirancang berdasarkan ide masyarakat local dan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Dari sudut pendapatan ekonomi, pariwisata alternatif juga memberi keuntungan langsung dan adil kepada masyarakat setempat karena pariwisata di daerahnya dikelola oleh masyarakat sendiri. Ini menunjukkan bahwa pariwisata alternatif sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan yang dinilai lebih adil dan memihak masyarakat dibandingkan sistem ekonomi liberal yang cenderung dikuasai para pemilik modal.

Terkait dengan pengembangan pariwisata alternatif, ada beberapa hal yang dapat disarankan yaitu Pemerintah atau pengambil keputusan politik perlu terus memasyarakatkan model pariwisata alternatif ini serta membantu menggali, mengembangkan dan memberdayakan potensi pariwisata yang ada. Berbagai pelatihan serta mengorganisasikan potensi-potensi masyarakat perlu terus dilakukan sehingga pariwisata alternatif dapat berlangsung sesuai tujuannya. Pemerintah harus terus memperkuat kemitraan dan saling pengertian dengan pihak industri, lembaga non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk selalu mengintegrasikan perencanaan dan pembangunan pariwisata alternatif sebagai kontribusi kepada program pembangunan berkelanjutan, sesuai Agenda 21. Pemerintah dan organisasi lain harus memprioritaskan dan memperkuat bantuan kepada proyek-proyek pariwisata yang berkontribusi kepada konservasi sumber daya, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun sumber daya alam dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Agenda 21, *United Nations Conference on Environment & Development, Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992:*
<https://www.google.com/search?q=sustainable+development+agenda+21&ie=utf->

- 8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a (diakses 30 Agustus 2013).
- Baswir, R. (2000). *Agenda Ekonomi Kerakyatan*: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bater, J. et al. (2001). *Planning for Local Level, Sustainable Tourism Development*. Canadian Universities Consortium: Urban Environmental Management Project Training & Technology Transfer Program, Canadian International Development Agency (CIDA).
- Blackwell, J. (1988). *The Tourism & Hospitality Industry*. Australia: International Magazine Services.
- Budiarta, I. P. (2012). *Pariwisata Alternatif: Pariwisata Bali Masa Depan (Literature Review)*: <http://madebayu.blogspot.com/2012/02/pariwisata-alternatif-pariwisata-bali.html> (diakses 1 September 2013).
- Bjork, P. (2001). *Sustainable Tourism Development, Fact or Fiction in Small Tourism Companies?*: http://lta.hse.fi/2001/3/lta_2001_03_s2.pdf (diakses 2 September 2013).
- Dalem, A.A.G.R., Wardi, IN. Suwarna, IW., Sandi Adnyana, IW. (2007). *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Universitas Udayana: Denpasar.
- Eco-Index. (2013). *Environmental Impcat of Tourism*: <http://www.gdrc.org/uem/ecotour/envi/three.html> (diakses 1 September 2013).
- Erawan, I N. (2008). *Manajemen Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan, Program Magister Kajian Pariwisata (hand-out)*. Universitas Udayana: Denpasar.
- Gilbert, D. (1993). Consumer Behaviour and Toutism Demand. In: Chrish Cooper, John Fletcher, David Gilbert, Stepen Wanhill (editor). *Tourism: Principle & Practices*. London: Pitman Publishing.
- Harun, R. (2008). *Konsep Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*: <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=15&dn=20081108062301> (diakses 30 Agustus 2013).
- Kodhyat, H. (1996). *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Leiper, Neil. (2004). *Tourism Management*. Australia Nasyional Library of Australia Cataloging- in-Publication Data.
- Mubyarto. (2003). *Ekonomi Kerakyatan dalam Era Globalisasi (makalah)*: <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Frepository.binus.ac.id%2Fcontent%2FJ0024%2FJ002444788.doc&ei=mwwkUrCnIMmOrQeK3YC4Aw&usg=AFQjCNFzatIkaMjmfWm36XrnHnzSRis7Vw&bvm=bv.51495398,d.bmk> (diakses 30 Agustus 2013).
- Pitana, I. G. Dan Gayatri, PG. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Smith, Valene L. and Eadington, William R. (1992). *Tourism Alternatives Potentials, Problems in the Development of Tourism*. England: Wiley & Sons Ltd.
- Suryawan, AA. (2008). *Manajemen Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan, Program Magister Kajian Pariwisata (hand-out)*. Universitas Udayana: Denpasar
- UNECE. (2013). *Sustainable development, Concept and Action*: http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development (diakses 30 Agustus 2013).
- UNEP. (2012). *Negative Impact Tourism*: <http://www.unep.org/resourceefficiency/Business/SectoralActivities/Tourism/FactsandFiguresaboutTourism/ImpactsOfTourism/EnvironmentalImpacts/tabid/78775/Default.aspx> (diakses 1 September 2013).
- United Nations. *Agenda 21, UNCED*: <http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&nr=23&type=400&menu=35> (diakses 31 Agustus 2013)
- WTTC. (2013). *World Economic Impact Report*: <http://www.wttc.org/research/economic-impact-research/> (diakses 31 Agustus 2013).